



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK GUNAWAN SUHARTO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN PERENCANAAN, KERJASAMA BISNIS DAN INFORMASI
3. NHK : 232257

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.871.070.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 392.610.000
2. Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 169.460.000
3. Tanah Seluas 1970 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
4. Tanah Seluas 1294 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
5. Tanah Seluas 1880 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 204.000.000
6. Tanah Seluas 1681 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/45 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 85.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 9.950.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 371.939.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.337.959.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.337.959.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.